

KRITIK POLANYI ATAS SELF-REGULATING MARKET

Sonny Keraf

ABSTRAKSI. "Peradaban abad ke19 telah hancur". Demikian Karl Polanyi menyatakan dalam bukunya *The Great Transformation*. Kehancuran peradaban tersebut tidak lain disebabkan karena kegiatan ekonomi dilepaskan dari asalusuhnya sebagai bagian dari relasi social. Lebih dari itu, muncul tuntutan agar kegiatan ekonomi dilepaskan dari urusan-urusan politik, atau lebih sering dikenal dengan istilah *self regulating market*. Polanyi meramalkan perilaku tersebut akan merusak tatanan sosial dan menghancurkan nilai-nilai manusia dan alam itu sendiri. Karena itu, tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan dunia ini kecuali kita kembali ke *embedded economy*. Tatanan ekonomi bukanlah tatanan yang berdiri sendiri secara otonom lepas dari pengaruh dan campur tangan politik dan institusi sosial lainnya. Namun, harus diakui bahwa kontrol dan campur tangan politik dan sosial dari negara tidak menjamin tatanan ekonomi menjadi lebih baik, terutama kalau negara sebagai wasit tidak bisa berlaku *fair*, adil dan tegas demi kepentingan bersama. Demi menjamin keadilan ekonomi institusi politik dan institusi sosial sangat dibutuhkan.

ABSTRACT. "*The Nineteenth-century civilization has collapsed*", thus wrote Karl Polanyi in *The Great Transformation*. The economic activity that should be rooted in the social relations, now, develops itself according to its own rule, i.e. the rule of *self-regulating market*. Polanyi predicates, that kind of behavior will destroy the social order and destruct human values as well as its own nature. He suggests that we should be back to the primary root of economic activity: the economic activity should be embedded in the social and political order. That means economic order is not an *outonomous order* apart from political and social institutions on the one side. But on the other side, the political and social control and intervention from state cannot guarantee a better economic welfare, if the state does not act as an *impartial party* that should be *fair* and *honest*. To achieve an *economical fairness*, *political and social institution* really are needed.

KATA KUNCI: *self-regulating market, barter, reciprocity, redistribution, pasar bebas, peranan negara, fairness.*

1. PENDAHULUAN

Harus saya akui sejak awal bahwa saya bukan ahli tentang Karl Polanyi. Saya baru mengenal Karl Polanyi dan pemikirannya secara agak

serius ketika diminta untuk ikut menelaah pemikiran Karl Polanyi ini dalam rangka serial diskusi Kolokium *Respons* Pusat Pengembangan Etika Universitas Atma Jaya Jakarta. Karena itu, harus saya akui juga bahwa pokok-pokok pemikiran yang saya kemukakan di sini lebih merupakan penafsiran dan pemahaman saya yang sangat terbatas tentang karya Karl Polanyi.

Tulisan ini akan mengemukakan beberapa poin terkait dengan topik mengenai Kritik Polanyi atas *Self-Regulating Market*. *Pertama*, kritik Polanyi atas *self-regulating market* harus ditempatkan dalam konteks telaah antropologis-sosiologisnya tentang manusia. *Kedua*, inti kritik Polanyi atas *self-regulating market* itu sendiri. *Ketiga*, sebuah catatan kritis atas kritik Karl Polanyi tentang *self-regulating market*. Dan *keempat*, perlunya penguatan institusi politik dalam rangka mengendalikan kecenderungan *self-regulating market* atau apa yang sekarang kita kenal sebagai neoliberalisme atau fundamentalisme pasar.

2. TELAAH ANTROPOLOGIS-SOSIOLOGIS

Pemikiran Polanyi pertama-tama harus dibaca sebagai sebuah telaah antropologis-sosiologis tentang pasar atau *self-regulating market*. Dalam arti itu, pendekatan Polanyi pun sangat kuat sebagai sebuah kajian historis. Dalam hal ini Polanyi berusaha membentangkan perkembangan relasi sosial masyarakat pramodern dan modern, khususnya yang dipengaruhi oleh ekonomi dan bagaimana dampak sosial yang ditimbulkannya. *Self-regulating market* dan *disembedded economy* harus dibaca dalam konteks ini. Yaitu, ketika ekonomi dianggap dan diperlakukan sebagai satu-satunya faktor dominan yang menentukan segala relasi sosial dan ketika ekonomi dilepaskan dari konteks sosial ternyata telah menimbulkan berbagai dampak serius dalam

kehidupan manusia, yang berujung pada apa yang ditegaskan Polanyi dalam kalimat pembuka bukunya, *The Great Transformation*, bahwa “Peradaban abad ke-19 telah hancur.”¹ Dengan hancurnya peradaban abad ke-19 akibat masuknya ekonomi pasar, “*The Hundred Years’ Peace*”² telah terganggu dan berada dalam bahaya. Manusia dan kehidupannya telah berkembang sedemikian rupa dari sebuah kehidupan yang dijiwai oleh semangat sosial saling membantu menuju kehidupan yang dijiwai oleh semangat transaksi di mana segala sesuatu diproduksi untuk dijual demi keuntungan (*gain*). Selama zaman pramodern atau sebelum abad ke-19 kegiatan ekonomi manusia berlangsung dalam relasi sosial dan tunduk kepada norma-norma sosial masyarakat. Ekonomi bukan aspek independen atau bahkan tidak mendominasi kehidupan dan relasi sosial. Dalam masyarakat modern dengan ekonomi pasar, khususnya *self-regulating market*, relasi sosial mengalami perubahan serius, ketika ekonomi mendominasi relasi sosial dan menentukan segala hubungan manusia. Segala sesuatu diproduksi sebagai komoditas untuk dijual, termasuk tanah, tenaga kerja dan uang, yang dianggapnya sebagai komoditas khayalan, sesuatu yang tidak terjadi selama masyarakat pramodern. Pada tingkat ini, manusia telah direduksi menjadi makhluk satu dimensi, yaitu sekedar sebagai makhluk ekonomi. Dengan itu, manusia dilepaskan dari dimensi sosial, dimensi spiritual, dimensi politik dan dimensi-dimensi lainnya. Sebagaimana juga dikatakan oleh Muhammad Yunus dari Bangladesh, sistem ekonomi pasar atau “kapitalisme menganut pandangan yang sempit tentang hakekat manusia, menganggap manusia sekedar sebagai makhluk satu-dimensi yang hanya peduli dengan upaya mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Konsep mengenai pasar bebas, sebagaimana yang umum dipahami, didasarkan pada konsep manusia sebagai makhluk satu-dimensi ini.”³ Padahal, sebagaimana yang menjadi

pemikiran Polanyi, bagi Muhammad Yunus, manusia pada dasarnya adalah makhluk multi-dimensi yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi belaka untuk dirinya sendiri, melainkan juga mempunyai berbagai dimensi lain seperti dimensi sosial yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu untuk meningkatkan kesejahteraan sesamanya, serta berbagai dimensi lainnya.

Dampak lebih lanjut dari perkembangan ini memang cukup luas. *Pertama*, sebagaimana akan kita singgung lebih lanjut di bawah, terjadi berbagai dampak negatif khususnya karena manusia menjadi sangat rakus dan tamak hanya mengejar keuntungan bagi dirinya sehingga cenderung melakukan berbagai praktek bisnis yang tidak bermoral dan pada akhirnya menimbulkan berbagai krisis ekonomi dan bisnis. Lebih dari itu, dengan kecenderungan ekonomi yang sedemikian dominan untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya, alam dieksploitasi untuk diperjualbelikan dengan segala akibatnya yang merugikan lingkungan hidup. *Kedua*, bersamaan dengan itu, ekonomi modern telah dilepaskan dari etika dan moral, yang dalam tradisi Aristoteles justru merupakan bagian tak terpisahkan, bahkan diajarkan sebagai bagian dari etika, bahkan sampai dengan Adam Smith. Ilmu ekonomi lalu berkembang menjadi sangat kuantitatif-kalkulatif dan kehilangan sentuhan moral dan sosial.⁴ Ilmu ekonomi yang seharusnya menjadi bagian dari etika sosial, atau ilmu sosial, telah melepaskan diri menjadi sebuah disiplin ilmu yang kehilangan sentuhan dan dimensi sosial dan moral.

3. KRITIK ATAS *SELF-REGULATING MARKET*

Tesis utama Polanyi, baik dalam rangka kritiknya terhadap *self-regulating market* maupun dalam menjelaskan pandangannya mengenai *embedded economy*, adalah bahwa manusia tetaplah makhluk sosial. Sebagai

mahluk sosial, kegiatan ekonomi manusia tertanam dalam relasi sosial. Aktivitas ekonomi tidak pertama-tama bertujuan untuk mengejar dan mempertahankan kepentingan pribadi, tetapi untuk mempertahankan posisi, klaim dan aset sosialnya. Manusia menghargai kebutuhan barang-barang material sejauh menunjang tujuan-tujuan mulia tadi. Aktivitas ekonomi hanyalah salah satu dari berbagai aktivitas manusia dalam kerangka berkembang menjadi manusia dalam komunitasnya, yang sangat menghargai ikatan sosial.

Dalam kaitan dengan itu, aktivitas ekonomi tentu saja dikenal juga dalam masyarakat pramodern. Akan tetapi, aktivitas ekonomi lebih ditempatkan dan berlangsung dalam kerangka menegaskan dimensi sosial dan memperkuat ikatan satu sama lain. Aktivitas ekonomi dipahami lebih dalam kerangka relasi timbal balik yang saling menguntungkan dan saling memenuhi kebutuhan masing-masing untuk berkembang sebagai mahluk sosial dalam ikatan komunitasnya yang peduli satu sama lain. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi merupakan penegasan dari hakekat manusia sebagai mahluk sosial yang multidimensional.

Masuknya ekonomi pasar telah mengubah manusia menjadi *homo oeconomicus* dengan konsekuensi seluruh tatanan sosial pun berubah. Tidak seperti dalam masyarakat pramodern, di mana kepentingan ekonomi bukan hal utama, dalam masyarakat pasar ekonomi justru yang utama. Dalam masyarakat pramodern, kepentingan ekonomi tidaklah penting karena komunitas mempunyai tanggung jawab mengurus setiap anggota. Ikatan sosial menjadi jauh lebih penting daripada mengejar kepentingan ekonomi. Untuk itu, setiap individu justru menjaga perilakunya sedemikian rupa agar terhormat, jujur dan baik kalau tidak dia akan kehilangan relasi sosial dengan sesamanya. Semua kewajiban moral dan sosial ini bersifat timbal balik:

berbuat baik kepada orang lain diyakini akan berbuah kebaikan sepadan dalam jangka panjang. Ini menyebabkan setiap individu berusaha mengeliminasi kepentingan pribadinya dalam berbagai aktivitas sosial, termasuk dalam bidang ekonomi.

Dalam konteks itulah, dalam kehidupan masyarakat pramodern, prinsip utama relasi dalam kehidupan ekonomi adalah resiprositas dan redistribusi, bukan dagang. Kebutuhan ekonomi dipenuhi secara timbal balik. Demikian pula, barang-barang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi adalah milik publik yang didistribusikan dalam pola relasi sosial yang penuh tanggung jawab akan kehidupan setiap anggota komunitas. Dalam konteks seperti itu, keuntungan tidak mempunyai tempat sama sekali. Memberi secara bebas dianggap sebagai sebuah keutamaan moral. Karena itu, tidak seperti yang diklaim oleh Adam Smith, tidak ada sama sekali apa yang disebut sebagai kecenderungan untuk “*barter, truck and exchange*.” Yang ada adalah kecenderungan untuk memberi secara bebas yang diyakini akan terjadi secara timbal balik (resiprositas).

Dengan latar belakang itu, tesis utama Polanyi mengenai *self-regulating market* – atau menggunakan istilah lain dari Polanyi, *self-adjusting market* – merupakan sebuah utopia. Pasar semacam itu mungkin dapat bertahan lama, tetapi akan menghancurkan manusia, masyarakat dan alam. Sama seperti Marx yang menganggap kapitalisme mengandung cacat bawaan yang akan menghancurkan dirinya sendiri oleh karena karakter eksploitatifnya terhadap tenaga kerja, Polanyi dalam nada dasar yang mirip menganggap *self-regulating market* hanyalah sebuah utopia yang tidak akan bisa bertahan lama karena mengandung cacat bawaan menghancurkan manusia, masyarakat dan alam. *Self-regulating market* melepaskan ekonomi dari masyarakat, dari akar sosialnya, menciptakan keterasingan kultural di antara manusia dan

menimbulkan kehancuran lingkungan hidup. Ekonomi seperti ini tidak bertahan lama karena ketika dampak menghancurkan ini terjadi, maka secara psikologis sebagai sebuah hukum alam, manusia akan bereaksi melindungi dan mempertahankan dirinya melalui berbagai institusi sosial yang melahirkan gerakan tandingan untuk mengendalikan *self-regulating market* itu sendiri. Karena itu, apa yang didambakan sebagai sebuah pasar yang mengatur dan mengendalikan dirinya sendiri tidak akan pernah terwujud. Ia hanyalah sebuah utopia belaka.

Ciri utama *self-regulating market* atau ekonomi pasar adalah bahwa segala pendapatan masyarakat diperoleh dari transaksi dagang yang berlangsung dengan mekanismenya sendiri yang “harus dibiarkan untuk berfungsi tanpa campur tangan dari luar.” Seluruh pendapatan masyarakat diperoleh melalui proses dagang dan transaksi dalam pasar yang sepenuhnya dibiarkan terjadi sesuai dengan mekanismenya sendiri melalui harga yang berlaku dalam pasar. “Harga harus dibiarkan mengatur dirinya sendiri. *Self-regulating market* seperti itulah yang kita maksudkan dengan ekonomi pasar.”⁵ “Sebuah ekonomi yang dikendalikan oleh harga pasar dan tidak ada yang lain kecuali harga pasar. Sistem seperti itu mampu mengatur seluruh kehidupan ekonomi tanpa pertolongan atau campur tangan dari pihak luar.”⁶ “Suatu ekonomi pasar adalah sebuah sistem ekonomi yang dikontrol, diatur dan diarahkan oleh harga pasar. Produksi dan distribusi barang diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pengaturan sendiri.”⁷

Tidak seperti sebelumnya, dalam sistem ekonomi pasar, keuntungan memainkan peranan yang sangat penting. Segala sesuatu diproduksi untuk dijual demi memperoleh keuntungan. Karena itu pendapatan semua orang adalah pendapatan yang diperoleh melalui perdagangan dalam pasar. Tidak ada pendapatan manusia yang diperoleh di luar mekanisme pasar. Maka ada

pasar untuk segala macam jenis dan unsur industri, termasuk untuk tenaga kerja, tanah, dan uang. Dengan demikian, tenaga kerja, tanah dan uang yang sebelumnya tidak mempunyai makna dan fungsi ekonomi selain fungsi sosial, telah berubah menjadi komoditas untuk diperdagangkan. Ini pada gilirannya mengubah cara pandang dan perilaku manusia modern di mana segala sesuatu cenderung diproduksi untuk diperdagangkan. Mentalitas manusia berubah total dari makhluk sosial yang peduli akan sesamanya dan karena itu rela melakukan apa pun untuk kepentingan sesamanya karena keyakinan bahwa dia sendiri pun akan dibantu oleh sesamanya. Manusia telah berubah menjadi makhluk ekonomi yang melakukan apa saja dengan kalkulasi untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bahkan seluruh aktivitas sosial dan interaksi manusia satu sama lain dilihat sebagai aktivitas dan interaksi transaksional dan dinilai hanya berdasarkan – dalam istilah George Soros – satu penanda umum yang sama, uang.⁸

Kelemahan utama dari sistem ekonomi pasar yang dikritik oleh Polanyi adalah dilepaskannya ekonomi dari konteks sosial. Bahkan lebih dari itu, *self-regulating market* menuntut dipisahkannya institusi sosial ekonomi dari politik. Politik tidak boleh mencampuri urusan ekonomi. Padahal, menurut Polanyi, hal ini tidak mungkin. Pasar dan regulasi adalah dua hal yang tumbuh berkembang bersama. Karena itu, tidak ada yang disebut sebagai *self-regulating market*. Bahkan bagi Polanyi, tatanan ekonomi hanyalah sebuah fungsi dari tatanan sosial. Tatanan ekonomi bukanlah tatanan yang berdiri sendiri secara otonom lepas dari pengaruh dan campur tangan politik dan institusi sosial lainnya. Dengan menggunakan bahasa ideologi *self-regulating market*, menurut Polanyi, memperlakukan manusia hanya sebagai tenaga kerja adalah sebuah kesalahan yang fatal. Alasan sederhananya karena tenaga

kerja sendiri adalah manusia yang merupakan inti dari setiap komunitas. Maksudnya melepaskan tenaga kerja dari manusia untuk dijual adalah sebuah kesalahan yang fatal, karena tidak mungkin tenaga kerja dilepaskan dari manusia untuk dijual seperti barang dagangan. Tenaga kerja manusia adalah satu dengan manusia dalam dimensinya sebagai makhluk sosial. Demikian pula tanah adalah alam semesta di mana komunitas manusia berada, yang karena itu tidak bisa dilepaskan dari kerangka sosial. Menempatkan manusia dan alam di bawah mekanisme dan hukum pasar berarti merendahkan harkat dan martabat manusia dan alam yang tidak diciptakan oleh siapa pun untuk dijual.

Dalam kaitan dengan ini, kesalahan utama sistem ekonomi pasar menurut Polanyi adalah menjadikan tenaga kerja, tanah dan uang sebagai komoditas. Bagi Polanyi ketiganya bukan komoditas. Kesalahannya terletak pada asumsi yang keliru bahwa segala sesuatu yang dibeli dan dijual pasti diproduksi untuk diperdagangkan. “Tenaga kerja adalah nama lain untuk aktivitas manusia itu sendiri dan karena itu melekat pada kehidupan manusia. Itu berarti tenaga kerja tidak diproduksi untuk diperdagangkan, tetapi untuk tujuan yang sama sekali berbeda. Tenaga kerja juga tidak bisa dipisahkan dari seluruh kehidupan manusia, dicadangkan atau diangkut kesana kemari untuk diperdagangkan. Tanah juga hanyalah nama lain untuk alam, yang tidak diproduksi oleh manusia. Akhirnya uang hanyalah nama lain untuk daya beli yang pada dasarnya sama sekali tidak diproduksi, tetapi muncul melalui mekanisme perbankan atau keuangan negara. Tidak ada satu pun dari ketiganya diproduksi untuk diperjualbelikan. Menggambarkan tenaga kerja, tanah dan uang sebagai komoditas adalah khayalan.”⁹ Kesalahan kedua, terletak dalam asumsi, sebagaimana telah dikatakan di atas, bahwa manusia adalah *homo economicus*, manusia hanya punya dimensi

ekonomi untuk diperdagangkan. Padahal, manusia pertama-tama adalah makhluk sosial, yang mempunyai dimensi sosial, moral, politis, spiritual dan sebagainya.

Menurut Polanyi, membiarkan mekanisme pasar menentukan nasib manusia dan alam akan menghancurkan manusia, masyarakat dan alam. Telah terjadi proses dehumanisasi manusia karena manusia diproduksi untuk diperjualbelikan sama seperti barang dagangan lainnya. Demikian pula, alam yang bukan merupakan produksi manusia telah didesakralisasikan menjadi barang dagangan untuk diperjualbelikan dengan segala dampaknya yang menghancurkan alam dan lingkungan hidup. Alasannya sederhana, ketika manusia dilepaskan dari katup pelindung dan pengamannya berupa institusi sosial dan moral dan diperdagangkan sebagai komoditas ini akan menghancurkan manusia itu sendiri, baik secara fisik, psikologis dan moral. “Manusia akan mati sebagai korban dari dislokasi sosial yang akut melalui kerakusan, kejahatan dan kelaparan.”¹⁰ Demikian pula, lingkungan hidup akan rusak dan hancur karena anggapan bahwa alam diproduksi untuk diperjualbelikan. Alam adalah sesuatu yang terberikan untuk menunjang kehidupan manusia, baik dalam wujud air, udara dan tanah itu sendiri. Alam bukan hasil produksi manusia untuk diperjualbelikan demi memperoleh keuntungan.

Polanyi sendiri pada dasarnya mengakui bahwa tenaga kerja, tanah dan uang adalah hal yang esensial bagi ekonomi pasar. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita sudah hidup bersama dengan kenyataan bahwa tenaga kerja, tanah dan uang adalah bagian penting dari ekonomi pasar. Bahkan bagi Polanyi kita tidak bisa menghindar dari sistem ekonomi pasar. Tetapi, baginya harus ada perlindungan terhadap ketiganya. Karena itulah, bagi Polanyi, sesungguhnya tidak ada yang disebut sebagai *self-regulating market*.

Sekali lagi, pasar dan regulasi selalu tumbuh berkembang berdampingan. Untuk itu, kontrol dan campur tangan dari negara sangat dibutuhkan. Bagi Polanyi, tidak hanya manusia dan alam, tetapi juga organisasi bisnis kapitalistik harus dilindungi dari dampak *self-regulating market* yang menghancurkan. Campur tangan negara untuk melindungi manusia, alam, dan organisasi bisnis dari kemungkinan kehancuran oleh borok *self-regulating market* adalah sebuah keharusan. Dan ketika campur tangan dan kontrol dari negara terjadi, maka apa yang diidealisasikan sebagai *self-regulating market* hanyalah utopia belaka.

Dalam analisis Polanyi, bahkan dalam sebuah sistem ekonomi pasar negara tetap dibutuhkan dan mempunyai peranan yang menentukan untuk relasi ekonomi, termasuk mengatur pasar itu sendiri. Ekonomi, termasuk pasar bebas, harus diatur, direncanakan. Ini pun berlaku dalam konteks global sekarang ini. Tetap saja dibutuhkan peran negara untuk mengendalikan pasar. Yang dibutuhkan adalah sebuah politik demokratis yang memungkinkan adanya kontrol demi menjamin kebebasan bagi semua. Maka, tidak ada yang namanya pasar bebas tanpa kontrol. Kontrol justru memungkinkan pasar dapat bekerja sesuai dengan esensinya tanpa menghancurkan manusia, alam dan organisasi bisnis. Kontrol dan campur tangan dari negara inilah yang dalam pandangan Polanyi merupakan bagian dari *counter movement*¹¹ untuk mengimbangi dampak negatif *self-regulating market* sekaligus melindungi manusia, masyarakat, alam dan organisasi bisnis. Bagi Polanyi, pemisahan ekonomi dari politik akan menghasilkan kebebasan (ekonomi) yang membahayakan keadilan dan keamanan. Tentu saja yang dimaksudkan adalah politik yang bebas dari kepentingan pribadi dan kelompok yang malah merusak dan menghambat ekonomi demi kepentingan bersama.

4. KRITIK ATAS KRITIK POLANYI

Ada beberapa catatan kritis atas pemikiran Polanyi. *Pertama*, pertanyaan paling pokok adalah ekonomi pasar yang mana yang dimaksud dalam analisis dan kritik Polanyi. Polanyi sendiri menyebutnya sebagai *self-regulating market*. Tapi, perlu pembedaan yang jeli untuk melihat lebih lanjut kontribusi dan signifikansi pemikiran Polanyi ini.

Secara kritis harus ditegaskan bahwa yang menjadi sasaran kritik Polanyi bukanlah sistem ekonomi pasar sebagaimana yang dicetuskan oleh Adam Smith. Terlepas dari adanya banyak perbedaan pemikiran di antara keduanya, Adam Smith sama sekali tidak melepaskan ekonomi dari konteks dan tatanan sosial. Adam Smith memang beranggapan bahwa manusia digerakkan oleh kepentingan pribadi dalam rangka untuk memenuhi kecenderungan kodrati setiap orang “*to better one’s own life*”, tetapi kepentingan pribadi ini mempunyai dimensi sosial membawa manfaat bagi kemajuan ekonomi bagi banyak orang lainnya. Bahkan Adam Smith sama sekali tidak melepaskan dan tidak memahami manusia semata-mata sebagai makhluk ekonomi. Mengikuti tradisi Aristoteles, Smith berpendapat manusia adalah makhluk sosial yang terlibat dalam interaksi sosial penuh dengan segala dimensi sosialnya, termasuk simpati dan cinta akan *fellow-beings*.

Karena itu, ekonomi pasar yang dimaksudkan oleh Adam Smith bukanlah pasar yang *self-regulating*. Pasar dalam pemahaman Adam Smith adalah sebuah kombinasi yang unik, antara *no intervention* di satu pihak untuk memungkinkan ekonomi dapat berkembang dan tumbuh sebagai solusi atas sistem ekonomi yang restriktif-kolutif penuh korupsi dalam sistem Merkantilisme. Pasar memang dibiarkan bebas demi prinsip moral kebebasan dan keadilan, tetapi di lain pihak, pasar yang bebas tersebut harus

pula diintervensi ketika menjadi liar demi menegakkan *fairness*, keadilan, demi prinsip *doing no harm* dalam ekonomi yang bebas tadi. Dalam konteks itu, bagi Adam Smith, pemerintah dan intervensi pemerintah adalah sebuah keharusan, bukan untuk menjadi pemain yang merecoki kompetisi yang bebas dan *fair*, tetapi justru untuk menegakkan keadilan, minimal menjaga prinsip *doing no harm* dalam pasar yang bebas.¹²

Dengan demikian, kiranya ekonomi pasar yang menjadi sasaran kiritik Polanyi adalah yang kini kita kenal sebagai neoliberalisme, di mana ekonomi mendominasi kehidupan sosial, di mana segala sesuatu dipahami dalam konteks transaksi ekonomi, termasuk pelayanan publik, politik, dan segala relasi sosial. Dengan kata lain, yang menjadi sasaran kritik Polanyi bukanlah ekonomi pasar yang klasik sebagaimana dicetuskan oleh Adam Smith, melainkan liberalisme pasar atau yang belakangan sering juga disebut sebagai Thatcherisme, Reagenisme dan *Consensus Washington*. Sebagaimana dikatakan oleh George Soros, “Fundamentalisme pasarlah yang menyebabkan ekonomi global menjadi tidak sehat dan tidak berkelanjutan.”¹³ Dalam ekonomi neoliberal ini memang segala sesuatu diproduksi untuk diperjualbelikan termasuk hubungan personal paling intim di tempat tidur pun diproduksi untuk dijual. Relasi manusia lalu direduksi menjadi sekedar relasi ekonomi dalam pasar di mana segala sesuatu hadir untuk diperjualbelikan demi keuntungan, demi uang.

Ideologi liberalisme pasar ini merasuki cara berpikir dan cara bertindak manusia modern sedemikian rupa sehingga segala sesuatu selalu dilihat dalam dimensi transaksional demi memperoleh keuntungan. Segala sesuatu dilihat dengan satu nilai, yaitu uang. Urusan izin, pendidikan, pelayanan kesehatan, tanah, air, dan bahkan perbuatan baik membantu orang lain selalu dilihat dan diterjemahkan dalam satu ukuran, untung alias

uang. “Apa keuntungan yang dapat saya peroleh” lalu menjadi *tag line* paling dominan dalam setiap relasi sosial manusia yang didominasi liberalisme pasar.

Kedua, pertanyaan berikut, kalau begitu apakah ada kontribusi baru dari Polanyi? Menurut saya, kontribusi Polanyi terutama terletak pada analisis sosiologis-antropologisnya mengenai dampak dari *self-regulating market*. Secara lebih khusus, ia mengingatkan kita mengenai bahaya dari baik *self-regulating market* maupun *disembedded economy* yang akan menghancurkan manusia, alam dan organisasi bisnis. Tetapi, Polanyi – seperti halnya Marx – yakin bahwa ekonomi pasar, kalau dibiarkan tanpa kendali, akan hancur dari dalam karena ada perlawanan sosial dan politik untuk melindungi masyarakat dan alam. Dalam konteks itu pula, Polanyi mempunyai kontribusi besar dalam analisisnya tentang komodifikasi tenaga kerja, tanah dan uang yang sangat berbahaya bagi dehumanisasi manusia, degradasi alam, dan kehancuran organisasi bisnis dalam sistem ekonomi pasar sebagaimana yang kita hadapi sekarang. Dia kembali mengingatkan kita akan apa yang telah dipikirkan oleh Adam Smith, untuk mengontrol pasar sedemikian rupa agar pasar tidak menjadi liar dan destruktif. Karena itulah, peran negara sangat dibutuhkan sebagai wasit yang netral dan tegas untuk melindungi kepentingan berbagai pihak dalam pasar yang bebas tersebut. Termasuk, dalam konteks global, dibutuhkan institusi pengontrol yang berfungsi mengendalikan pasar global dari kecenderungan destruktifnya yang merugikan para pemain, manusia, dan alam.

4. PENUTUP

Berkaitan dengan sumbangan tersebut di atas, dua catatan lain ingin dikemukakan di sini. *Pertama*, pertanyaan yang masih tersisa adalah, mengapa

pasar, baik sebagaimana dikehendaki oleh Adam Smith maupun yang dikehendaki oleh Polanyi, berkembang menjadi liar tanpa kontrol dengan segala dampak buruknya sebagaimana kita alami sampai sekarang? Mengapa *counter movement*-nya Polanyi atau intervensi negara-nya Adam Smith tidak mampu mengendalikan pasar untuk tidak sampai menghancurkan peradaban manusia?

Pertanyaan ini menjadi semakin relevan dan mendesak ketika kita dihadapkan pada pengalaman buruk hancurnya berbagai perusahaan besar di Amerika Serikat mulai dari Enron sampai dengan perusahaan sebesar Lehman Brothers. Mengapa pasar yang didambakan oleh Adam Smith sebagai pasar yang terkontrol dengan peran negara yang kuat untuk menegakkan keadilan dan menjadi kompetisi yang *fair*, ternyata tidak terwujud. Kenapa pasar telah berkembang menjadi liar sebagai sebuah neoliberalisme yang pada akhirnya menghancurkan ekonomi sebesar dan sekuat Amerika Serikat?

Persoalannya terletak pada kontrol dan intervensi oleh negara atau institusi sosial. Yang ideal adalah, kontrol atau intervensi itu seharusnya demi kepentingan publik: menegakkan keadilan, *fairness*, melindungi hak asasi manusia, melindungi lingkungan hidup, dan segala macam nilai lainnya. Dan itu berarti, ekonomi harus kembali di bawah perintah dan kendali moral, termasuk politik yang bermoral. Ekonomi tidak bisa dilepaskan dari kendali moral. Karena itu, dibutuhkan penguatan institusi politik, baik pada tingkat nasional maupun internasional untuk mengendalikan ekonomi pasar bebas tersebut.

Problemnya, kontrol dan intervensi politik dan sosial, khususnya dari institusi negara, ternyata tidak bebas kepentingan. Negara demokrasi masih *in making* di sebagian besar belahan dunia, termasuk Indonesia. Kita

masih dalam proses mencari bentuk ideal demokrasi politik untuk menjamin kontrol dan intervensi pasar murni demi kepentingan publik (*bonum commune*). Sementara itu, negara-negara maju baik dari segi ekonomi dan demokrasi tetap dipenjara oleh kepentingan ekonominya – yang terlanjur menikmati kemajuan ekonomi dan karena itu tidak rela kemajuan ekonominya terganggu oleh kepentingan publik seluruh umat manusia. Maka, berbagai interaksi ekonomi dunia pun ternyata masih saja tetap tunduk pada hukum kepentingan dengan segala dampak yang menghancurkan.

Dengan kata lain, ada kegagalan pasar di satu pihak yang telah berkembang liar menjadi fundamentalisme pasar. Pasar yang mengabsolutkan dirinya sendiri. Pasar yang meradikalisasi dirinya menjadi *self-regulating* tanpa kontrol. Tetapi di pihak lain ada kegagalan politik, negara dalam hal ini, dalam mengontrol pasar itu sendiri sebagaimana yang dikehendaki bahkan oleh Bapak Pasar Bebas itu sendiri, Adam Smith. Negara, dan institusi politik dan sosial, termasuk di negara seperti Amerika Serikat, telah gagal memainkan peran sentralnya yang pas tanpa menjadi distorsif terhadap pasar. Negara laai berperan sebagai wasit yang adil, *fair* dan tegas demi kepentingan bersama, termasuk demi menegakkan dan mempertahankan pasar yang bebas itu sendiri.

Kedua, sehubungan dengan itu, kalau kita mau konsisten dengan pemikiran Polanyi, itu sama artinya kita diajak untuk kembali ke sistem ekonomi pasar yang klasik, yang asli sebagaimana dicetuskan oleh Adam Smith. Ini karena kita sudah hidup bersama sistem ekonomi pasar, di mana kita tidak bisa lagi kembali kepada sistem pra ekonomi pasar. Akan tetapi, sistem ekonomi pasar yang kita masukkan adalah sistem ekonomi pasar yang bebas-terkontrol, yang bebas tetapi justru sekaligus - paradoksnya –

disertai dengan hukum yang mempertahankan pasar yang bebas itu sendiri. Ekonomi yang bebas tetapi ada aturan mainnya minimal untuk menjaga persaingan yang sehat dan *fair*. Singkatnya, ekonomi yang masih mengenal, minimal prinsip *fairness*, atau prinsip *no harm* dalam interaksi ekonomi. Tetapi, untuk itu, adalah sebuah keharusan bahwa untuk menjamin tegaknya aturan main demi kebebasan dan *fairness* tersebut, dibutuhkan institusi negara yang menjaga diberlakukannya aturan main dalam ekonomi pasar yang bebas dan penuh kompetisi tersebut.

Ini pun berlaku di dalam konteks ekonomi global. Bahkan orang seperti George Soros pun mendambakan adanya aturan main dan institusi global yang menjaga tegaknya aturan main tersebut. Dalam bukunya *The Crisis of Global Capitalism*, Soros secara khusus membahas pasar keuangan global yang sangat liberal. Baginya, kehancuran pasar keuangan global dan juga ekonomi berbagai negara justru karena tidak adanya institusi global yang menjaga agar pasar keuangan global itu dapat berfungsi dengan baik dan menjamin kepentingan semua pemain secara *fair*. Fundamentalisme pasar atau neoliberalisme telah mengancam masyarakat global. Dan itu terjadi karena ekonomi global tidak mengenal adanya kontrol. “Tanpa kontrol, ekonomi global rentan untuk hancur.” “Ini terutama karena kegagalan politik dan erosi moral baik pada tingkat nasional maupun internasional.”¹⁴

Untuk itu, bagi Soros, “Untuk menstabilkan dan mengatur sebuah ekonomi yang benar-benar global, kita membutuhkan sebuah sistem pembuatan keputusan politik global. Singkatnya, kita membutuhkan sebuah masyarakat global untuk mendukung ekonomi global.”¹⁵ Persisnya, kita membutuhkan sebuah hukum internasional dan institusi internasional untuk

menjaga dan mengendalikan ekonomi global tersebut sebagai sebuah sistem ekonomi pasar bebas yang sekaligus terkendali.

Dalam konteks yang berbeda, Muhammad Yunus, penerima Nobel Perdamaian dari Bangladesh, menekankan pula pentingnya peran aturan yang masuk akal dan kontrol dari negara untuk menjamin keadilan ekonomi, khususnya kepentingan rakyat miskin, dalam sistem ekonomi pasar bebas sekarang ini. “Tanpa kontrol semacam itu, kaum kaya akan dengan mudah menyimpangkan kondisi ekonomi sedemikian rupa untuk kemaslahatan mereka sendiri.”¹⁶ Tiadanya kontrol dari institusi politik inilah yang menyebabkan kapitalisme atau sistem ekonomi pasar yang kini tidak mempunyai tandingan yang memadai ini, telah menghadirkan berbagai dampak yang merugikan: eksploitasi tenaga kerja murah, termasuk anak-anak, di negara-negara sedang berkembang; pencemaran lingkungan oleh berbagai perusahaan; dan cara-cara pemasaran dan periklanan yang penuh tipu daya. Muhammad Yunus mengakui bahwa kini ideologi ekonomi pasar tidak mempunyai tandingan yang memadai. Karena itu, tampaknya dunia tidak bisa menghindari dari sistem ekonomi pasar. Akan tetapi, demi menjamin keadilan ekonomi, khususnya kepentingan kaum miskin, institusi politik seperti negara dan institusi sosial seperti *social business* yang dikembangkannya untuk menyejahterakan kaum miskin dengan memanfaatkan sistem ekonomi pasar, sangat dibutuhkan.

CATATAN AKHIR

¹ Lihat Polanyi, *The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time* (Boston: Beacon Press), 2001, hal. 3

² Lihat Polanyi (2001), Judul Bab I, *op.cit.*, hal. 3.

³Lihat Yunus, *Creating a World without Poverty. Social Business and the Future of Capitalism* (New York: Public Affairs), 2007, hal. 18.

⁴ Lihat Sen, *On Ethics and Economic* (Oxford: Blacwell), 1994.

⁵ Lihat Polanyi (2001), *op.cit.*, hal. 44.

⁶ *Ibid*, hal. 45.

⁷ *Ibid.* hal. 71.

⁸ Lihat Soros, *The Crisis of Global Capitalism* (New York: Public Affairs), 1998, hal. xxvi.

⁹ Lihat Polanyi (2001), *op.cit.*, hal. 75-76.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 76.

¹¹ Tentang pemikiran Polanyi mengenai double movement akan dibahas dalam artikel yang lain.

¹² Lihat Keraf, *Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah. Telaah atas Etika Ekonomi Politik Adam Smith* (Yogyakarta: Kanisius), 1996.

¹³ Lihat Soros (1998), *op.cit.*, hal. xx.

¹⁴ Lihat Soros (1998), *op.cit.*, hal. xix, xxiii

¹⁵ *Ibid.*, hal. xxix.

¹⁶ Lihat Yunus (2007), *op.cit.*, hal. 5.

DAFTAR PUSTAKA

- Baum, Gregory, (1996), *Karl Polanyi on Ethics and Economics*, Montreal: McGill-Queen's University Press.
- Keraf, A. Sonny, (1996), *Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah, Telaah atas Etika Ekonomi Politik Adam Smith*, Yogyakarta: Kanisius.
- Polanyi, Karl, (2001), *The Great Transformation, The Political and Economic Origins of Our Time*. Boston: Beacon Press.
- Sen, Amartya, (1988), *On Ethics and Economic*, Oxford: Blackwell.
- Soros, George, (1998), *The Crisis of Global Capitalism*, New York: Public Affairs.
- Stanfield, J.R., (1986), *The Economic Thought of Karl Polanyi*, London: The Macmillan Press LTD.
- Yunus, Muhammad, (2007), *Creating a World without Poverty. Social Business and the Future of Capitalism*, New York: Public Affairs.